

PELUANG DAN TANTANGAN PEMBANGUNAN DAERAH OTONOM BARU DI INDONESIA (STUDI KASUS KABUPATEN PANGANDARAN PROVINSI JAWA BARAT)

Muhamad Nur Afandi

STIA LAN Bandung, Jl. Cimandiri 34-38 Bandung
e-mail: m.n.afandi@gmail.com

Abstrak

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru, maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal, Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

Penelitian yang peneliti lakukan bertujuan antara lain : Untuk mengetahui potensi-potensi yang dimiliki oleh Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat; Untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dihadapi oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta Untuk mengetahui upaya-upaya yang dilakukan untuk memanfaatkan dan mengatasi peluang dan tantangan yang ada. penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif, sedangkan teknik pengumpulan data yang digunakan melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian yang telah peneliti lakukan adalah Warga Pangandaran memiliki percaya diri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenal luas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewat pendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilai kecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalam penanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antara daerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007, dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuangan mereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat; Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalam strategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah; serta Dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri dengan maksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.

Kata Kunci: Pembangunan, Daerah otonomi baru.

OPPORTUNITIES AND CHALLENGES NEW AUTONOMOUS REGIONAL DEVELOPMENT IN INDONESIA (PANGANDARAN DISTRICT CASE STUDY OF WEST JAVA)

Abstract

The reason most prominent in the discourse of regional expansion is in line with the spirit of regional autonomy, some provinces/districts/cities are considered to have too broad areas necessary to facilitate the reduction of red tape and administrative services from the provincial capital to the area by way of expansion, namely the unification of several counties/city into a new province, as well as the unification of several districts/villages into new districts/cities. Formal judicial, Act 32 of 2004 (previous Law. 22, 1999) and PP. 78 Year 2007 on Procedures for the Establishment, Abolition, and Merging Regions (previous PP. 129 Year 2000 requirements, establishment and Redistricting Criteria, Elimination and Merging areas), administrative regional divisions into a new trend in the structure of government in Indonesia.

The research aims are: To determine the potential of which is owned by the District of Pangandaran in improving the welfare of the community; To identify opportunities and challenges faced by the government of the District of Pangandaran in improving the welfare of society as well as to know the efforts being made to utilize and address the

opportunities and challenges that exist. This research uses descriptive method with qualitative approach, while the data collection techniques used through interviews, observation, and documentation.

The results of the research that has been done is a citizen of Pangandaran. Researchers have pretty high confidence, because it was a barn of revenue. In addition, the name of this area is well known to many regions. Pangandaran has a lot to contribute to Kudat via tourist revenues, hotel tax, and other restaurants. However, the payoff received is little to Pangandaran. The desire to separate themselves from the parent district, appears, because of the disappointment in the handling of development in Pangandaran. Much neglected infrastructure, as well as the distance between the center of this area to the district too far, which is more than 100 km and on July 17, 2007, it was formed at once Presidium of Kudat District Redistricting South in the struggles of Law No. 21 Year 2012 on establishment of District Pangandaran in West Java Province; New Autonomous Region of Pangandaran has strategic value in the southern region of Java development strategy initiated by the government, as well as the establishment of the Autonomous Region of New Pangandaran is expected to be a tourist town with maximally independent branded name in the world of tourism.

Keywords: *Development, new regional autonomy*

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah negara yang berpenduduk lebih dari 200 juta jiwa dan bersifat majemuk (plural) dalam hal etnis, bahasa daerah, agama, budaya, geografi, demografi dan lain-lain. Dengan jumlah pulau sebanyak 17.508 pulau (Pusat Survei dan Pemetaan ABRI, 1987) dan Luas daratan adalah 1.922.570 km² serta luas perairannya 3.257.483 km². Keadaan geografis Indonesia yang berupa kepulauan berpengaruh terhadap mekanisme pemerintahan Negara Indonesia. Dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah. Untuk memudahkan pengaturan atau penataan pemerintahan maka diperlukan adanya suatu sistem pemerintahan yang dapat berjalan secara efisien dan mandiri serta dekat dengan rakyat sehingga diperlukan pemekaran - pemekaran wilayah baru menjadi provinsi maupun kabupaten/kota.

Alasan paling mengemuka dalam wacana pemekaran daerah adalah sejalan dengan semangat otonomi daerah; beberapa provinsi/kabupaten/kota dianggap memiliki wilayah terlalu luas sehingga diperlukan upaya untuk memudahkan pelayanan administrasi dan pemangkasan birokrasi dari ibu kota provinsi ke daerah dengan cara pemekaran, yaitu dengan penyatuan beberapa kabupaten/kota menjadi provinsi baru, maupun penyatuan beberapa kecamatan/kelurahan menjadi kabupaten/kota baru. Secara yuridis formal, Undang Undang No.32 Tahun 2004 (sebelumnya UU No. 22 Tahun 1999) dan PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah (sebelumnya PP No. 129 Tahun 2000 Tentang Persyaratan, Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan daerah), pemekaran wilayah administratif menjadi kecenderungan baru dalam struktur pemerintahan di Indonesia.

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 Tentang Pemerintahan dan PP Nomor 78 Tahun 2007 secara administratif mensyaratkan 5 kecamatan untuk membentuk kabupaten baru, untuk membentuk kota pemekaran minimal terdiri dari 4 kecamatan dan provinsi baru dapat dibentuk minimal terdiri dari 5 kabupaten/kota. Disamping itu PP No.78/2007 mensyaratkan adanya batas usia minimal. Pemekaran dapat dilakukan setelah mencapai batas minimal usia penyelenggaraan pemerintahan 7 tahun untuk kabupaten/kota, dan 10 tahun untuk provinsi (pasal 8 PP No.78 Tahun 2007). Desentralisasi merupakan salah satu perubahan sosial politik yang dialami Indonesia dan diimplementasikan melalui Undang Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, khususnya yang menyangkut Pembentukan dan Kriteria Pemekaran, Penghapusan dan Penggabungan Daerah. Semangat otonomi daerah tercermin antara lain pada keinginan sebagian daerah untuk memekarkan diri dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Fenomena tersebut telah menimbulkan sikap pro dan kontra di berbagai kalangan politisi, tokoh masyarakat, pejabat pemerintah, dan di antara para pakar. Mereka memperdebatkan manfaat ataupun kerugian yang timbul dari banyaknya wilayah yang dimekarkan. Berbagai pandangan dan opini disampaikan untuk mendukung sikap masing-masing pihak. Fitriani et al. (2005) menyatakan bahwa pemekaran telah membuka peluang terjadinya bureaucratic and political rent-seeking, yakni kesempatan untuk memperoleh keuntungan dana, baik dari pemerintah pusat maupun dari penerimaan daerah sendiri. Lebih lanjut dikatakan bahwa, karena adanya tuntutan untuk menunjukkan kemampuan menggali potensi wilayah, maka banyak daerah menetapkan berbagai pungutan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal ini menyebabkan terjadinya suatu

perekonomian daerah berbiaya tinggi. Lebih jauh lagi timbul pula tuduhan bahwa pemekaran wilayah merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi. Euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan "aspirasinya" mendorong terjadinya pemekaran. Di sisi lain, banyak pula argumen yang diajukan untuk mendukung pemekaran, yaitu adanya kebutuhan untuk mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan. Alasan lainnya adalah diupayakannya pengembangan demokrasi lokal melalui pembagian kekuasaan pada tingkat yang lebih kecil (Ida, 2005).

Fenomena keinginan berpisahnya satu daerah untuk membentuk daerah otonomi sendiri melalui mekanisme pemekaran wilayah yang sudah direncanakan secara *top down* maupun melalui usulan warganya saat ini menunjukkan keinginan masyarakat wilayah tersebut untuk memperoleh *benefit* yang lebih besar dari proses pembangunan disamping kendala-kendala yang terjadi secara administrasi karena jauhnya letak geografis wilayah tersebut dari pusat kekuasaan provinsi/kabupaten, kurangnya pelayanan publik dll. Provinsi Jawa Barat dengan wilayah yang luas tergolong memiliki jumlah kota dan kabupaten sedikit. Provinsi Jawa Barat yang memiliki luas wilayah ± 35.377,76 km² dengan penduduk pada tahun 2011 berjumlah ± 45.423.259 jiwa terdiri atas 17 kabupaten dan 9 kota. Dengan keadaan seperti itu, kota dan kabupaten yang ada di Jawa Barat . salah satu Kabupaten yang ada di Jawa Barat adalah Kabupaten Ciamis.

Ciamis merupakan salah satu kabupaten yang mempunyai wilayah yang sangat luas dengan luas wilayah ± 2.424,71 km² dan jumlah penduduk pada tahun 2011 berjumlah ± 1.746.795 jiwa terdiri atas 36 kecamatan dan 353 desa/kelurahan memiliki potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung peningkatan penyelenggaraan pemerintahan dan perlu untuk dimekarkan. Dengan luasnya wilayah Ciamis, pengelolaan pelayanan terhadap warga menjadi jauh dan tidak efisien (bayangkan, penduduk di Pangandaran, atau bahkan Cijulang, perlu menempuh tiga jam perjalanan paling minimal, untuk mengurus Surat Izin Mengemudi atau Nomor Pokok Wajib Pajak ke Ciamis). Pembangunan di Kabupaten Ciamis yang

memiliki 36 kecamatan dinilai belum merata akibat wilayah yang terlalu luas dan anggaran yang terbatas. Potensi ekonomi pun belum tergali optimal. Aspirasi 10 kecamatan di wilayah selatan Kabupaten Ciamis untuk memisahkan diri dari Ciamis bukan didasarkan pada buruknya infrastruktur. Keinginan membentuk daerah otonom itu lebih disebabkan keinginan masyarakat setempat untuk mendapatkan pelayanan publik yang lebih baik dan cepat. Gambar 1 adalah peta wilayah kabupaten Ciamis.

Keinginan Pangandaran atau daerah Ciamis bagian selatan, untuk memisahkan diri dari Kabupaten Ciamis, sebenarnya sudah menjadi wacana sejak tahun 2002. Waktu itu, ada semacam forum Paguyuban Masyarakat Pakidulan (PMP) yang juga menyuarakan Pangandaran ingin pisah dari Ciamis. Keinginan itu mengemuka karena potensi Pangandaran dianggap tidak diolah secara maksimal. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewat pendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilai kecil. Penataan Pangandaran waktu itu juga dirasakan tidak berjalan dengan baik. Proyek pembangunan pelabuhan, juga mengalami kemandekan. Artinya, ada segudang masalah hingga akhirnya membuat masyarakat Pangandaran dan sekitarnya, berkeinginan memisahkan diri dari Ciamis. Sebagai kota tujuan wisata, sudah saatnya Pangandaran mengelola secara mandiri potensi-potensinya. Sudah menjadi kecenderungan umum di dunia, kota-kota wisata bersifat mandiri sehingga mereka bisa maksimal mem'branding' namanya di dunia pariwisata. Hal ini tentu tak akan maksimal jika Pangandaran masih mengikuti kabupaten induknya. Mengapa? Kita tahu potensi ekonomi Kabupaten Ciamis tidak seluruhnya berasal dari pariwisata. Kabupaten Ciamis harus membagi pengelolaan (pelayanan maupun finansialnya) dengan daerah-daerah lain di wilayahnya. Kondisi ini memang tak terelakan. Hasilnya kita lihat, pembangunan Pangandaran sebagai kota wisata tak memiliki kemajuan yang berarti. Dengan pembentukan Kabupaten Pangandaran bisa melengkapi strategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang yang mendasari lahirnya kabupaten baru (DOB) yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 16

November 2012, dan kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 17 November 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di Provinsi Jawa Barat. Dalam kondisi demikian, timbul pertanyaan apakah kesejahteraan masyarakat dan kualitas pelayanan publik pada akhirnya benar-benar meningkat setelah daerah tersebut dimekarkan? Berdasarkan fenomena di atas, maka penulis tertarik untuk diteliti lebih lanjut.

B. LANDASAN TEORI

1. Pengertian Pembangunan

Pembangunan menurut Katz (dalam Tjokrowinoto 1995) adalah “pergeseran dari suatu kondisi nasional yang satu menuju kondisi nasional yang lain, yang dipandang lebih baik dan lebih berharga”. Disamping itu menurut Todaro (1977) pembangunan juga merupakan “proses multi dimensional yang menyangkut perubahan-perubahan yang penting dalam suatu struktur, sistem sosial ekonomi, sikap masyarakat dan lembaga-lembaga nasional dan akselerasi pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan dan pemberantasan kemiskinan absolute”. Pengertian tersebut mengisyaratkan bahwa pembangunan berarti proses menuju perubahan-perubahan yang dimaksudkan untuk memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat itu sendiri.

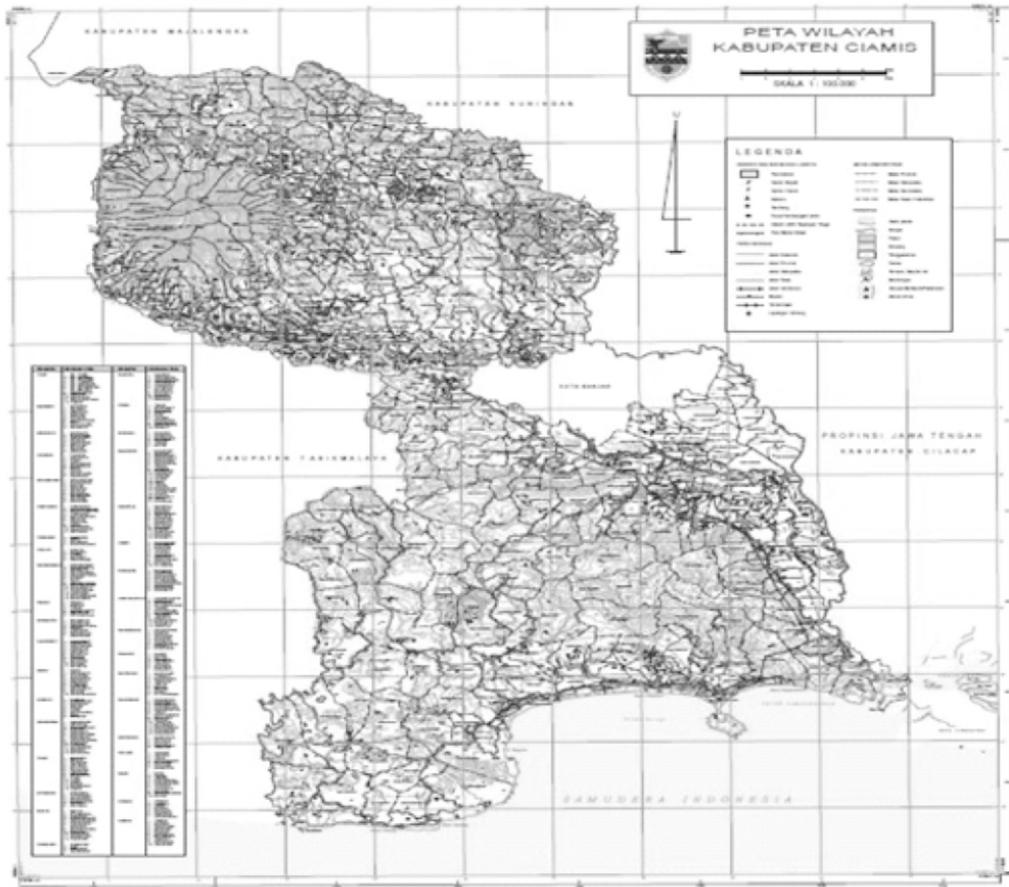
Dalam pengertian pembangunan para ahli memberikan berbagai macam definisi tentang pembangunan, namun secara umum ada suatu kesepakatan bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan. Siagian (1994) memberikan pengertian tentang bagaimana pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (Nation building)”. Adapun Ginanjar Kartasasmita (1997: 9) memberikan pengertian yang lebih sederhana tentang pembangunan yaitu: “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Upaya untuk memahami makna dan strategi pembangunan yang tepat telah melibatkan para ahli dari berbagai disiplin ilmu akibatnya konsep pembangunan menjadi *multi interpretable* namun disamping itu pembangunan harus dipahami sebagai proses multi dimensional dan mencakup

perubahan orientasi dan sistem organisasi sosial, ekonomi, politik dan kebudayaan. Todaro melihat pembangunan sebagai: “proses yang multi dimensional dari struktur masyarakat, perilaku, kelembagaan, perkembangan ekonomi, pengurangan kepincangan, dan penghapusan kemiskinan absolut dari masyarakat”. Tiga nilai yang menjadi tujuan pembangunan adalah: (1) Live sustenance atau terpenuhinya kebutuhan dasar manusia berupa sandang, pangan papan, kesehatan, dan perlindungan dari ancaman, (2) self esteem, kemampuan untuk menjadi diri sendiri, (3) freedom for survival, yaitu kemampuan untuk memilih secara bebas.

Meskipun pengertian pembangunan amat bervariasi namun menurut Esmam (Tjokrowinoto 1999: 91) secara umum pembangunan dapat diartikan sebagai “proses perubahan dari kondisi nasional yang satu ke kondisi nasional yang di pandang lebih baik atau kemajuan yang terus menerus menuju perbaikan kehidupan manusia yang mapan”. Pembangunan masyarakat desa menurut Tjokrowinoto (1999: 35) dapat dilakukan berdasarkan 3 azas, diantaranya: (1) azas pembangunan integral, (2) azas kekuatan sendiri, (3) azas pemufakatan bersama. Azas pembangunan integral ialah pembangunan yang seimbang dari semua segi masyarakat desa. Azas kekuatan sendiri adalah tiap-tiap usaha pertama-tama harus berdasarkan kekuatan sendiri, azas pemufakatan bersama ialah pembangunan harus dilaksanakan secara benar untuk menjadi kebutuhan masyarakat desa dan putusan untuk melaksanakan proyek bukan atas prioritas atasan tetapi merupakan keputusan bersama anggota masyarakat desa.

Disamping itu strategi desa yang telah dikembangkan antara lain pendekatan dari atas (*top down*), pendekatan dari bawah (*bottom up*) dan pendekatan pengelolaan mandiri oleh masyarakat desa (*community base management*). Pendekatan '*top down*' dilaksanakan berdasarkan jalan pikiran bahwa masyarakat desa adalah pihak yang bodoh dan belum dapat memikirkan serta mengerjakan apa yang baik untuk mereka. Jadi semua segi kehidupan dirancang dan diturunkan dari pemerintahan. Pendekatan '*bottom up*' dilaksanakan dengan asumsi bahwa masyarakat desa telah memiliki kemampuan untuk memikirkan dan mengerjakan kebutuhannya sendiri dan pemerintah hanya turut serta dalam sistem administrasinya. Pendekatan '*community base management*'



Gambar 1.
Peta Wilayah Kabupaten Ciamis

sebenarnya bukan gagasan baru namun muncul dan digali dari masyarakat setempat yang diangkat dari praktek masyarakat tradisional dalam mengelola sumber daya alam untuk kesejahteraan ekonomi bersama dalam desa tanpa campur tangan pemerintah.

Pembangunan memerlukan perencanaan karena kebutuhan pembangunan lebih besar daripada sumber daya yang tersedia. Melalui perencanaan ingin dirumuskan kegiatan pembangunan yang secara efisien dan efektif dapat memberi hasil yang optimal dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia dan mengembangkan potensi yang ada.

2. Pengertian Administrasi Pembangunan

Sebagai suatu peralatan analisis ilmu, administrasi pembangunan berkembang dari disiplin ilmu yang mendahuluinya yakni administrasi negara. Administrasi negara sendiri merupakan perpaduan utama dari ilmu administrasi dan ilmu politik.

Selaras dengan uraian di atas, Weidner (Soeprapto, 2000:27) merumuskan: *Development administration: public administration with a special purpose. Administration with the*

objective of political, economies, and social development. Development administration is the process of guiding an organization toward achievement of development objectives.

(administrasi pembangunan: administrasi publik (negara) dengan kegunaan khusus. Administrasi yang dilaksanakan dengan tujuan politik, ekonomi, dan pembangunan sosial. Dimana administrasi pembangunan juga merupakan sebuah proses yang menuntun sebuah organisasi untuk mencapai tujuan-tujuan pembangunan)

Rumusan administrasi pembangunan ini menjelaskan kedudukannya sebagai bagian dari administrasi negara yang memiliki fungsi khusus yakni memberikan dukungan pada suatu organisasi untuk mewujudkan tujuan-tujuan dalam pembangunan, sebab pada hakikatnya administrasi negara lebih menekankan pada rasionalitas, tertib, dan efisiensi unit-unit kegiatan pemerintah.

Adapun definisi administrasi pembangunan menurut Gant (Badri, 1983:28):

Development administration is the term used to denote the complex agencies, management systems, and the processes a government establishes to achieve

its development goals. It is the adjustment of the bureaucracy to the fastly increased number, variety and complexity of government functions required to respond to the public demands for development. Development administration is the administration of policies, programs, and projects to serve development purposes.

(Adminstrasi pembangunan adalah istilah yang digunakan untuk menjelaskan badan-badan yang kompleks, sistem-sistem manajemen, dan proses-proses yang dibangun oleh sebuah pemerintah dalam rangka mencapai tujuan-tujuan pembangunannya. Ia adalah penyesuaian dari birokrasi untuk meningkatkan secara cepat jumlah, keragaman dan kompleksitas dari fungsi-fungsi pemerintahan yang dibutuhkan untuk menanggapi permintaan masyarakat terhadap pembangunan. Administrasi pembangunan adalah administrasi dari berbagai kebijakan, program-program, dan berbagai proyek untuk mewujudkan berbagai manfaat pembangunan)

Berdasarkan berbagai pengertian tentang administrasi pembangunan, maka terdapat dua ciri pokok yang menjadi pendekatan dalam konsep administrasi pembangunan (Tjokroamidjojo, 1978:10-11) yakni:

- Orientasinya kepada usaha-usaha kearah perubahan-perubahan keadaan yang dianggap lebih baik. Bahkan diarahkan untuk membantu dan mendorong kearah perubahan-perubahan besar (*basic changes*)... merintis perubahan (*initiate changes*)... dan melakukan perubahan (*innovate*).
- Perbaikan dan penyempurnaan administrasi dikaitkan dengan aspek-aspek perkembangan dibidang-bidang lain seperti ekonomi, sosial, politik, dan lain-lain.

Selanjutnya, Soeprapto (2000: 28-29) menjelaskan ruang lingkup dari administrasi pembangunan, yaitu :

... ruang lingkup administrasi pembangunan memiliki dua fungsi yaitu penyusunan kebijaksanaan dan penyempurnaan administrasi negara. Dalam hal ini adalah penyempurnaan organisasi, pembinaan lembaga yang diperlukan, tata kerja, dan pengurusan sarana-sarana administratif lainnya. Ini yang disebut *the development of administration*. Fungsi lainnya adalah penyempurnaan administrasi untuk mendukung perumusan kebijaksanaan-kebijaksanaan dan program-program pembangunan (diberbagai bidang) serta pelaksanaannya secara efektif. Ini disebut

juga sebagai *the administration of development*.

Dengan adanya uraian-uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa administrasi pembangunan merupakan upaya pengembangan administrasi negara ke arah pencapaian tujuan-tujuan pembangunan. Munculnya ciri administrasi pembangunan sebagai sebuah pendekatan, lebih disebabkan pada konteks pembangunan sebagai suatu perubahan yang terencana, mencakup berbagai kebijakan serta memiliki berbagai program, yang harus diimplementasikan oleh organisasi-organisasi pemerintahan. Disatu sisi, konteks administrasi dalam organisasi pemerintah menuntut adanya penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

3. Pengertian Daerah (Otonom)

Dalam pasal 1 huruf e UU No. 5/1974 yang di kutib Ibrahim (1997) mendefenisikan daerah otonom sebagai kesatuan masyarakat umum (*rech gemeenschap*) yang mempunyai batas tertentu, yang berhak, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiridalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dalam Syarif dan Jubaedah (2006) daerah otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah, berwenang dan berkewajiban mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Bagir Manan yang dikutip oleh Syarifin dan Jubaedah (2006) menyebutkan bahwa daerah otonom merupakan sarana yang mawadahi perbedaan (sosial, ekonomi, budaya) dengan prinsip Bhineka Tunggal Ika.

Oppenhei dalam Ibrahim (1997) memberikan suatu ilustrasi tentang daerah otonom dalam konteksnya dengan negara kesatuan. Ia menyatakan bahwa daerah otonom itu adalah bagian organisasi daripada negara. Implikasinya, daerah otonom memiliki kehidupan sendiri yang bersifat sendiri (*zelfstanding*), tidak merdeka (*nietonafhankelijk*) daripada negara kesatuan, merupakan masyarakat hukum (*rechtsgemeenschap*) yang berarti berhak mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Selain itu, ada hal-hal esensial dari suatu daerah otonom menurut

Jeddawi(2008) adalah:

- ▶ Memiliki sendiri urusan pemerintahan
- ▶ Memiliki perangkat daerah sendiri
- ▶ Pelaksanaan urusan pemerintahan dilakukan sendiri
- ▶ Memiliki sumber-sumber keuangan sendiri

Pembentukan daerah otonom di Indonesia dikatakan Syarifin dan Jubaedah (2006) didasari oleh empat macam tuntutan sebagai berikut:

- a) Tuntutan hukum. Indonesia adalah negara berdasar atas hukum (*rechstaat*) sebab suatu ciri negara hukum adalah pembagian kekuasaan dan pemencaraan kekuasaan (*scheidingspreiding van machten*) guna mencegah bertumpuknya kekuasaan pada suatu pusat pemerintahan.
- b) Tuntutan negara kesejahteraan. Negara kesejahteraan adalah negara hukum yang memperhatikan upaya mewujudkan kesejahteraan orang banyak sehingga negara atau pemerintah mewakili kewajiban untuk mewujudkan sebagaimana ditentukan dalam Pancasila dan UUD 1945.
- c) Tuntutan demokrasi. Kerakyatan atau kedaulatan adalah demokrasi. Kerakyatan atau demokrasi menghendaki partisipasi daerah otonom yang disertai badan perwakilan sebagai wadah (yang memperluas) kesempatan rakyat berpartisipasi.
- d) Tuntutan kebhinekaan. Rakyat (bangsa) Indonesia baik sosial, ekonomi maupun budaya adalah masyarakat pluralistik yang mempunyai sifat dan kebutuhan yang berbeda-beda untuk mewujudkan keadilan, kesejahteraan, keamanan, sebab tidak mungkin memaksa keseragaman (uniformitas) yang tepat meningkatkan gangguan terhadap rasa keadilan, kesejahteraan dan keamanan.

4. Pengertian Manajemen Pembangunan Daerah

Dari kupasan masing-masing unsur diatas, manajemen pembangunan daerah dapat diartikan sebagai sebuah upaya sistematis dan terencana untuk melakukan perubahan sosial di daerah otonom yang sudah ditentukan oleh undang-undang, dimana secara umum bertujuan untuk mendukung program pembangunan nasional dan secara khusus untuk memberikan kesempatan bagi daerah dalam rangka mengembangkan potensi atau keunggulan yang dimiliki masing-masing.

Mengacu pada pengertian tersebut, maka tak diragukan bahwa manajemen pembangunan daerah memiliki arti sangat penting guna mendorong adanya perubahan masyarakat ke arah yang lebih baik.

Daerah merupakan bagian dari sebuah negara. Setiap daerah merupakan elemen pembentuk lahirnya negara yang bhineka layaknya Indonesia. dengan kata lain, dari beberapa uraian diatas dapatlah disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan manajemen pembangunan daerah tidak lain adalah seni dan ilmu tentang bagaimana mewujudkan perubahan daerah yang ada, baik sumber daya manusia maupun sumber daya lainnya. Hal ini menjadi urgen mengingat peran daerah yang sangat besar dalam menyuplai APBN dan mendukung keberhasilan penyelenggaraan negara manakala kekuasaan yang sentralistik seringkali tidak sanggup menjangkau semua jengkal wilayah. Akibatnya, isu kemiskinan, kesenjangan, pengangguran nasionalisme, stabilitas keamanan nasional seringkali mengemuka akibat marjinalisasi peran daerah oleh pemerintah pusat. Kemajuan daerah bermakna penting bagi kemajuan sebuah negara manakala keberhasilan pencapaian tujuan negara akan sangat ditandai oleh terpenuhinya kemakmuran dan kesejahteraan bagi rakyat yang menghuni seluruh wilayah di negara yang bersangkutan.

5. Peluang dan Tantangan Pembangunan Daerah Otonom Baru

Otonomi daerah dapat dikatakan sebagai hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri. Otonomi sebenarnya tidak hanya merupakan hak, melainkan juga kewajiban yang harus dijalankan. Hal ini memang sudah dituangkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dan dipahami bahwa hak dan kewajiban seyogyanya selalu berjalan seiring dan seimbang. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana hak dan kewajiban itu di implementasikan di lapangan.

Otonomi yang luas sebenarnya merupakan pengejawantahan dari makna desentralisasi secara utuh. Desentralisasi secara sederhana dapat diartikan sebagai penyerahan wewenang yang implementasinya harus diiringi dengan penyerahan sumber-sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan wewenang tersebut termasuk tanggungjawabnya.

Mintzberg(1983) membedakan tiga tipe desentralisasi, yaitu desentralisasi vertikal

(*vertical decentralization*), desentralisasi horizontal (*horizontal decentralization*), dan desentralisasi dispersal (pemindahan/pelimpahan). Desentralisasi vertikal adalah desentralisasi yang diberikan secara hierarkis dari atas ke bawah (*top down*) dalam suatu struktur organisasi. Desentralisasi horizontal adalah pendelegasian dari suatu unit dalam sebuah organisasi kepada unit lain yang setingkat. Sedangkan desentralisasi dispersal adalah pelimpahan wewenang dari suatu organisasi/unit yang lebih tinggi kepada unit-unit lainnya sebagai kepanjangan tangan. Konsep yang terakhir ini, dalam sistem di negara kita mendekati konsep dekonsentrasi.

Apapun konsep yang dikembangkan dalam upaya memahami otonomi daerah, pada akhirnya tetap akan bermuara pada suatu pemahaman yang menjadi hakikat otonomi itu sendiri. Pada hakikatnya otonomi diarahkan pada upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemberdayaan daerah secara optimal.

Pada reformasi dan otonomi daerah ini, sudah selangkah kita memanfaatkan peluang yang sudah diperoleh daerah untuk membangun daerahnya secara mandiri melalui penerapan otonomi daerah. Otonomi perlu dilaksanakan secara proporsional dan profesional. Janganlah kesempatan ini dijadikan sebagai kesempatan untuk bersikap aji mumpung, dimana para elit daerah berlomba-lomba membangun kroni dan kerajaan kecil dengan mengatasnamakan rakyat/daerah melalui kewenangan yang dimilikinya, sehingga yang muncul bukan keberhasilan dalam mengelola daerah melainkan hanya mengembangkan kualitas dan kuantitas KKN daerah.

Pemerintah daerah dan suprastruktur daerah lainnya harus memikirkan bagaimana kita memulai membangun daerah dan menggali potensi daerah tanpa harus membebani masyarakat.

C. METODOLOGI PENELITIAN

Metode Penelitian

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui peluang dan tantangan yang dimiliki oleh Daerah Otonom Baru (DOB) Kabupaten Pangandaran dengan menggunakan perspektif pendekatan kualitatif. Dengan pemilihan rancangan deskriptif kualitatif, maka penulis akan melakukan pendekatan terhadap obyek

penelitian dengan menggali informasi sesuai dengan persepsi penulis dan informan dan dapat berkembang sesuai dengan interaksi yang terjadi dalam proses wawancara. Penulis senantiasa menginterpretasikan makna yang tersurat dan tersirat dari penjelasan yang diberikan informan, hasil observasi lapangan serta catatan pribadi.

Teknik Pengumpulan Data

Adapun Objek Penelitian (Penentuan Informan) dilakukan melalui wawancara. Wawancara dalam penelitian ini dilakukan kepada unsur pejabat yang terkait/SKPD di pemerintah daerah Kabupaten Ciamis. Cara Pengumpulan Data yang dilakukan dalam aktivitas penelitian ini meliputi sebagai berikut:

- Studi dokumentasi, yaitu dengan mempelajari data-data, Informasi-informasi yang berhubungan dengan potensi Kabupaten Pangandaran yang diakses baik melalui internet maupun sumber informasi lainnya dan juga data-data dan informasi dari Kabupaten Ciamis, karena kabupaten tersebut adalah kabupaten induk dari Kabupaten Pangandaran sebelum dimekarkan;
- Observasi. dilakukan melalui pengamatan secara langsung ke Kabupaten Pangandaran, dengan maksud untuk melengkapi dan mendukung data dan informasi yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan wawancara;
- Wawancara, yaitu upaya memperoleh data dan informasi yang melalui percakapan secara langsung (*face to face*) antara peneliti dengan informan yang sudah ditetapkan.

Uji Keabsahan Data

Uji Kredibilitas Data: Menurut Sugiyono (2008: 121) ada beberapa macam cara yang dapat dilakukan untuk menguji kredibilitas atau keterpercayaan terhadap data hasil penelitian kualitatif, yaitu dengan perpanjangan pengamatan, peningkatan ketekunan dalam penelitian, triangulasi, diskusi dengan teman sejawat, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check. Dari berbagai macam cara tersebut, penulis akan menggunakan salah satu di antaranya menurut kebutuhan penelitian. Cara yang dipilih adalah melalui triangulasi teknik pengumpulan data. Data yang diperoleh baik melalui wawancara, observasi dan dokumentasi dicek kebenarannya dengan membandingkan hasil ketiganya. Uji Reliabilitas: Mengenai reliabilitas,

pengertiannya dalam penelitian kuantitatif sangat berbeda dengan penelitian kualitatif. Menurut Sugiyono (2008: 119) hal ini terjadi karena terdapat perbedaan paradigma dalam melihat realitas. Dalam penelitian kualitatif, suatu realitas bersifat majemuk/ganda, dinamis/selalu berubah, sehingga tidak ada yang konsisten dan berulang seperti semula. Dalam pengujian keabsahan data, metode penelitian kualitatif menggunakan istilah berbeda dengan penelitian kuantitatif. Uji keabsahan data dalam penelitian kualitatif meliputi uji *credibility* (validitas internal), *transferability* (validitas eksternal), *dependability* (reliabilitas) dan *confirmability* (obyektifitas).

Prosedur Pengolahan Data dan Analisis Data

Model Analisis Data: Data yang diperoleh dari penelitian lapangan digunakan sebagai bahan analisis deskriptif dengan terlebih dahulu dilakukan seleksi dan reduksi data. Kemudian semua data dan informasi yang dihasilkan dari penelitian ini disusun secara sistematis. Teknik Analisis Data: Analisis SWOT digunakan untuk menganalisis potensi-potensi yang dimiliki oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran dalam rangka menemukan peluang dan tantangan. peluang dan tantangan itu selanjutnya diuji untuk mengetahui isu mana yang paling strategis yang harus diintervensi lebih dahulu. Berdasarkan isu strategis terpilih maka disusunlah strategi-strategi yang akan digunakan untuk memanfaatkan peluang yang dimiliki Kabupaten Pangandaran dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang akan digunakan nantinya untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat. Identifikasi faktor-faktor strategis haruslah benar-benar akurat dan aktual yang akan digunakan sebagai bahan analisis SWOT, maka jawaban informan harus diteliti dan diklasifikasi secara cermat termasuk melakukan triangulasi seperlunya.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan kajian manajemen strategis yang mengacu kepada model yang dikembangkan oleh Bryson. Model ini dimodifikasi sehingga hanya menggunakan 4 (empat) langkah antara lain: (1) identifikasi Mandat dan misi organisasi, (2) identifikasi lingkungan eksternal dan lingkungan internal organisasi, (3) identifikasi isu-isu strategis, dan (4) perumusan strategi guna mengatasi isu-isu strategis.

D. PEMBAHASAN

Adapun uraian mengenai pembahasan seperti diuraikan di bawah ini:

A. Gambaran Umum Kabupaten Pangandaran

1. Wilayah Kabupaten Pangandaran

Kabupaten Pangandaran yang merupakan pemekaran dari Kabupaten Ciamis terdiri atas 10 kecamatan, yaitu Kecamatan Parigi, Kecamatan Cijulang, Kecamatan Cimerak, Kecamatan Cigugur, Kecamatan Langkaplancar, Kecamatan Mangunjaya, Kecamatan Padaherang, Kecamatan Kalipucang, Kecamatan Pangandaran, dan Kecamatan Sidamulih. Kabupaten Pangandaran memiliki luas wilayah keseluruhan ± 1.010 km² dengan jumlah penduduk ± 426.171 jiwa pada tahun 2011 dan 92 desa/kelurahan. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Parigi adalah Desa Parigi, Desa Ciliang, Desa Cibenda, Desa Karangbenda, Desa Karangjaladri, Desa Cintaratu, Desa Cintakarya, Desa Selasari, Desa Parakanmanggu, dan Desa Bojong. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cijulang adalah Desa Cijulang, Desa Cibanten, Desa Ciakar, Desa Kondangjajar, Desa Batukaras, Desa Kertajaya, dan Desa Margacinta. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cimerak adalah Desa Cimerak, Desa Masawah, Desa Sindangsari, Desa Mekarsari, Desa Sukajaya, Desa Kertamukti, Desa Ciparanti, Desa Kertaharja, Desa Legokjawa, Desa Limusgede, dan Desa Baturalang. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Cigugur adalah Desa Cigugur, Desa Campaka, Desa Cimindi, Desa Bunisari, Desa Kertajaya, Desa Pagerbumi, dan Desa Harumandala. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Langkaplancar adalah Desa Langkaplancar, Desa Bangunjaya, Desa Pangkalan, Desa Bojongkondang, Desa Jayasari, Desa Karangkamiri, Desa Bojong, Desa Cimanggu, Desa Jadikarya, Desa Bangunkarya, Desa Sukamulya, Desa Jadimulya, Desa Mekarwangi, dan Desa Cisarua.

Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Mangunjaya adalah Desa Mangunjaya, Desa Kertajaya, Desa Sukamaju, Desa Sindangjaya, dan Desa Jangraga. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Padaherang adalah Desa Padaherang, Desa Pasirgelis, Desa Karangmulya, Desa Kedungwuluh, Desa Karangpawitan, Desa Cibogo, Desa Maruyungsari, Desa Panyutran, Desa Paledah, Desa Ciganjeng, Desa Bojongsari, Desa Sindangwangi, Desa Suka Nagara, dan Desa Karang Sari. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Kalipucang adalah Desa Kalipucang, Desa Tunggilis, Desa Banjarharja, Desa Ciparakan,

Desa Cibuluh, Desa Emplak, Desa Pamotan, Desa Bagolo, dan Desa Putrappingan. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Pangandaran adalah Desa Pangandaran, Desa Babakan, Desa Pananjung, Desa Sukahurip, Desa Purbahayu, Desa Pagergunung, Desa Wonoharjo, dan Desa Sidomulyo. Desa yang masuk dalam cakupan Kecamatan Sidamulih adalah Desa Sidamulih, Desa Pajaten, Desa Kalijati, Desa Cikembulan, Desa Cikalong, Desa Sukaresik, dan Desa Kersaratu. Batas-batas wilayah Kabupaten Pangandaran:

- Sebelah utara berbatasan dengan Desa Ciulu, Desa Pasawahan, Desa Cikupa Kecamatan Banjarsari, Desa Sidarahayu Kecamatan Purwadadi, Desa Sidamulih Kecamatan Pamarican Kabupaten Ciamis dan Desa Citalahab Kecamatan Karangjaya, Desa Cisarua Kecamatan Cineam Kabupaten Tasikmalaya;
- Sebelah timur berbatasan dengan Desa Tambaksari, Desa Sidanegara, Desa Rejamulya Kecamatan Kedungreja, Desa Sidamukti, Desa Patimuan, Desa Rawaapu, Desa Cinyawang, Desa Purwodadi Kecamatan Patimuan Kabupaten Cilacap Provinsi Jawa Tengah;
- Sebelah selatan berbatasan dengan Samudera Hindia; dan
- Sebelah barat berbatasan dengan Desa Pasangrahan Kecamatan Cikatomas, Desa Neglasari, Desa Tawang, Desa Panca Wangi, Desa Mekarsari Kecamatan Pancatengah, Desa Cimanuk Kecamatan Cikalong, Desa

Mulyasari Kecamatan Salopa Kabupaten Tasikmalaya.

Kabupaten Pangandaran merupakan kabupaten yang berada di wilayah pesisir dengan cirri khas sebagai wilayah atau kawasan pariwisata. Adapun peta kabupaten Pangandaran sebagaimana Gambar 2.

2. Sejarah Pangandaran

Pada mulanya Pananjung merupakan salah satu pusat kerajaan, sejaman dengan kerajaan Galuh Pangauban yang berpusat di Putra pinggan sekitar abad XIV M. setelah munculnya kerajaan Pajajaran di Pakuan Bogor. Nama rajanya adalah Prabu Anggalarang yang salah satu versi mengatakan bahwa beliau masih keturunan Prabu Haur Kuning, raja pertama kerajaan Galuh Pagauban, namun sayangnya kerajaan Pananjung ini hancur diserang oleh para Bajo (Bajak Laut) karena pihak kerajaan tidak bersedia menjual hail bumi kepada mereka, karena pada saat itu situasi rakyat sedang dalam keadaan paceklik (gagal panen). Pada tahun 1922 pada jaman penjajahan Belanda oleh Y. Everen (Presiden Priangan) Pananjung dijadikan taman baru, pada saat melepaskan seekor banteng jantan, tiga ekor sapi betina dan beberapa ekor rusa. Karena memiliki keanekaragaman satwa dan jenis ± jenis tanaman langka, agar kelangsungan habitatnya dapat terjaga maka pada tahun 1934 Pananjung dijadikan suaka alam dan marga satwa dengan luas 530 Ha.



Gambar 2.
Wilayah Kabupaten Pangandaran

Pada tahun 1961 setelah ditemukannya Bunga Raflesia padma status berubah menjadi cagar alam. Dengan meningkatnya hubungan masyarakat akan tempat rekreasi maka pada tahun 1978 sebagian kawasan tersebut seluas 37,70 Ha dijadikan Taman Wisata. Pada tahun 1990 dikukuhkan pula kawasan perairan di sekitarnya sebagai cagar alam laut (470,0 Ha) sehingga luas kawasan pelestarian alam seluruhnya menjadi 1000,0 Ha. Perkembangannya selanjutnya, berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.104/KPTS-II/1993 perusahaan wisata TWA Pananjung Pangandaran diserahkan dari Direktorat Jenderal Perlindungan Hutan dan Pelestarian Alam kepada Perum Perhutani dalam pengawasan Perum Perhutani Unit III Jawa Barat, Kesatuan Pemangkuan Hutan Ciamis, bagian Kemangkuan Hutan Pangandaran. Pada awalnya Desa Pananjung Pangandaran ini dibuka dan ditempati oleh para nelayan dari suku Sunda. Penyebab pendatang lebih memilih daerah Pangandaran untuk menjadi tempat tinggal karena gelombang laut yang kecil yang membuat mudah untuk mencari ikan. Karena di Pantai Pangandaran inilah terdapat sebuah daratan yang menjorok ke laut yang sekarang menjadi cagar alam atau hutan lindung, tanjung inilah yang menghambat atau menghalangi gelombang besar untuk sampai ke pantai. Di sinilah para nelayan menjadikan tempat tersebut untuk menyimpan perahu yang dalam bahasa sundanya disebut *andar* setelah beberapa lama banyak berdatangan ke tempat ini dan menetap sehingga menjadi sebuah perkampungan yang disebut Pangandaran. Pangandaran berasal dari dua buah kata pangan dan daran. yang artinya pangan adalah makanan dan daran adalah pendatang. Jadi Pangandaran artinya sumber makanan para pendatang. Lalu para sesepuh terdahulu memberi nama Desa Pananjung, karena menurut para sesepuh terdahulu di samping daerah itu terdapat tanjung di daerah ini pun banyak sekali terdapat keramat-keramat di beberapa tempat. Pananjung artinya dalam bahasa sunda *Pangnanjung-nanjungna* (paling subur atau paling makmur).

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012, Undang-Undang yang mendasari lahirnya kabupaten baru (DOB) yang ditandatangani oleh Presiden SBY pada 16 November 2012, dan kemudian diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Amir Syamsudin pada 17 November 2012, maka Pangandaran resmi menjadi Kabupaten di

Provinsi Jawa Barat. Dalam UU No. 21/2012 disebutkan, Kabupaten Pangandaran (Jabar) berasal dari sebagian wilayah Kabupaten Ciamis, yang terdiri dari: Kecamatan Parigi; Kec. Cijulang; Kec. Cimerak; Kec. Cigugur; Kec. Langkaplancar; Kec. Mangunjaya; Kec. Padaherang; Kec. Kalipucang; Kec. Pangandaran; dan Kec. Sidamulih. Ibukota Kabupaten Pangandaran berkedudukan di Kec. Parigi. Pada tahap awal biaya penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten Pangandaran akan didukung oleh hibah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ciamis sebesar Rp 5 miliar/tahun selama 2 (dua) tahun berturut-turut, dan hibah sebesar Rp 4,5 miliar untuk pelaksanaan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati pertama kali. Sementara Pemda Provinsi Jabar akan mengalokasikan bantuan hibah sejumlah Rp 2,5 miliar/tahun untuk 2 (dua) tahun berturut-turut, serta Rp 2,5 miliar untuk penyelenggaraan pemilihan Bupati dan/atau Wakil Bupati pertama kali. <http://setkab.go.id/berita-6677-telah-lahir-kabupaten-pangandaran-pesisir-barat-manokwari-selatan-dan-pegunungan-arfak.html>, diunduh Maret 2013.

B. Potensi yang Dimiliki Kabupaten Pangandaran

1. Potensi Sumber Daya Manusia

Jumlah penduduk di Daerah Otonom Baru Pangandaran berdasarkan data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebanyak 442.598 jiwa, sedangkan jumlah pegawai yang diusulkan dialih tugaskan sebanyak 4545, dengan demikian di peroleh perbandingan 1 PNS : 109 penduduk. Artinya setiap 1 PNS melayani 109 penduduk. Apabila dibandingkan dengan kabupaten induk kondisi tingkat pelayanan PNS kepada masyarakat masih cukup baik, mengingat tingkat pelayanan di kabupaten induk setelah mengalami pemekaran setiap 1 orang PNS melayani 103 orang penduduk.

2. Potensi Pariwisata

a) Cukang Taneuh (*Green Canyon*)

Nama Green Canyon sendiri dipopulerkan oleh seorang warga Perancis pada tahun 1993. Sedangkan Cukang Taneuh punya arti yaitu jembatan tanah. Hal itu dikarenakan di atas lembah dan jurang Green Canyon terdapat jembatan dari tanah yang digunakan oleh para petani di sekitar sana untuk menuju kebun mereka. Green Canyon Indonesia ini terletak di Desa Kertayasa, Kecamatan

Cijulang, Ciamis, Jawa Barat. Dari Kota Ciamis sendiri berjarak sekitar 130 km atau jika dari Pangandaran berjarak sekitar 31 km. Di dekat objek wisata ini terdapat objek wisata Batukaras serta Lapangan Terbang Nusawiru. Objek wisata ini sebenarnya merupakan aliran dari sungai Cijulang yang melintas menembus gua yang penuh dengan keindahan pesona stalaktif dan stalakmitnya. Selain itu daerah ini juga diapit oleh dua bukit, juga dengan banyaknya bebatuan dan rerimbunan pepohonan. Semuanya itu membentuk seperti suatu lukisan alam yang begitu unik dan begitu menantang untuk dijelajahi. Untuk mencapai lokasi ini wisatawan harus berangkat dari dermaga Ciseureuh. Kemudian melanjutkan perjalanan dengan menggunakan perahu tempel atau kayuh yang banyak tersedia di sana. Jarak antara dermaga dengan lokasi *Green Canyon* sekitar 3 km, yang bisa ditempuh dalam waktu 30-45 menit. Sepanjang perjalanan kita akan melewati sungai dengan air berwarna hijau toska. Mungkin dari sinilah nama *Green Canyon* berasal.

Begitu terlihat jeram dengan alur yang sempit yang sulit dilewati oleh perahu berarti sudah sampai di mulut *Green Canyon*, di mana airnya sangat jernih berwarna kebiru-biruan. Di sinilah awal petualangan menjelajah keindahan objek wisata ini dimulai. Dari sini wisatawan dapat melanjutkan perjalanan ke atas dengan berenang atau merayap di tepi batu. Disediakan ban dan pelampung bagi yang memilih untuk berenang. Meski harus menempuh cara seperti ini, perjalanan dijamin sepenuhnya aman. Bahkan untuk anak-anak 6 tahun ke atas cukup aman untuk menyusuri aliran sungai dengan menggunakan ban dan dipandu oleh pemilik perahu yang disewa. Perjalanan akan terus berada dalam cekungan dinding terjal di kanan kiri aliran sungai. Dinding-dinding untuk menyajikan keindahan tersendiri, yang paling unik berbentuk menyerupai sebuah gua yang atapnya sudah runtuh. Selain itu di bagian atas beberapa kali pengunjung akan melewati stalaktit-stalaktit yang masih dialiri tetesan air tanah. Setelah beberapa ratus meter berenang, akan terlihat beberapa air terjun kecil di bagian kiri kanan yang begitu menawan. Jika diteruskan berenang maka pengunjung akan sampai pada ujung jalan, di

mana terdapat gua yang dihuni oleh banyak kelelawar. Alur aliran sungai ini cukup panjang, sehingga pengunjung dapat berenang sepuas-puasnya sambil mengikuti arus dari air terjun. Selain pemandangan indah di atas permukaan air, *Green Canyon* akan menjadi surga tersendiri bagi yang suka menyelam. Tinggal membawa beberapa alat selam, pemandangan menakjubkan cekungan-cekungan di dalam air siap untuk ditelusuri dan dinikmati, lengkap dengan beragamnya ikan-ikan yang berenang ke sana kemari di dasar lubuk. Bagi yang suka menantang adrenalin, dapat meloncat dari sebuah batu besar dengan ketinggian 5m ke dasar lubuk yang dalam.

Bagi Anda yang benar-benar ingin menikmati keindahan objek wisata *Green Canyon* harus paham dengan musim-musimnya. Karena saat terbaik untuk bisa menikmati keindahan objek wisata ini adalah beberapa saat setelah masuk musim kemarau. Karena jika pada musim hujan, dikhawatirkan deras sungai dan warna airnya pun akan menjadi coklat. Untuk akses berperahu, disana tersedia armada perahu yang cukup banyak. Ada sekitar 100 unit perahu yang dapat mengantarkan Anda untuk menelusuri objek wisata ini. Pada setiap perahu akan dilengkapi seorang juru dan tugas batu untuk memandu Anda dalam perjalanan.

b) Pantai Pangandaran

Objek wisata yang merupakan primadona pantai di Jawa Barat ini terletak di Desa Pananjung Kecamatan Pangandaran dengan jarak \pm 92 km arah selatan kota Ciamis, atau 236 km dari kota Bandung. memiliki berbagai keistimewaan seperti:

- Dapat melihat terbit dan tenggelamnya matahari dari satu tempat yang sama
- Pantainya landai dengan air yang jernih serta jarak antara pasang dan surut relatif lama sehingga memungkinkan kita untuk berenang dengan aman
- Terdapat pantai dengan hamparan pasir putih
- Tersedia tim penyelamat wisata pantai
- Jalan lingkungan yang beraspal mulus dengan penerangan jalan yang memadai
- Terdapat taman laut dengan ikan-ikan dan kehidupan laut yang mempesona.

Dengan adanya faktor-faktor penunjang tadi, maka wisatawan yang datang di Pangandaran dapat melakukan kegiatan yang beraneka ragam: berenang, berperahu pesiar, memancing, keliling dengan sepeda, para sailing, jet ski dan lain-lain. Adapun acara tradisional yang terdapat di sini adalah Hajat Laut, yakni upacara yang dilakukan nelayan di Pangandaran sebagai perwujudan rasa terima kasih mereka terhadap kemurahan Tuhan YME dengan cara melarung sesajen ke laut lepas. Acara ini biasa dilaksanakan pada tiap-tiap bulan Muharam, dengan mengambil tempat di Pantai Timur Pangandaran. *Event* pariwisata bertaraf internasional yang selalu dilaksanakan di sini adalah Festival Layang-layang Internasional (Pangandaran *International Kite Festival*) dengan berbagai kegiatan pendukungnya yang bisa kita saksikan pada tiap bulan Juni atau Juli.

c) Citumang Pangandaran

Obyek wisata alam Citumang merupakan obyek wisata yang memiliki daya tarik khusus, yaitu sungai Citumang yang mengalir membelah hutan jati dengan airnya yang bening kebiruan. Tepian sungai yang terdiri dari ornamen batu-batu padas dengan relung dalam dihiasi relief alam dan aliran sungai yang menembus ke dalam goa. Keheningan alam akan Anda jumpai disini. Musik alami berupa gemericik air sungai, bisikan angin sepoi yang menyelinap di antara pepohonan dan suara satwahutan yang tak pernah sepi. Obyek wisata ini terletak di Desa Bojong Kecamatan Parigi Ciamis, berjarang lebihJalan menuju lokasi kurang 15 km dari Pangandaran ke arah barat. Atau sekitar 4 km dari jalan raya Pangandaran - Cijulang. Jarak seluruhnya dari kota Ciamis sekitar 95 km.

d) Pantai Batu Hiu

Sebuah pantai dengan tebing cukup terjal yang memiliki pemandangan lepas kearah samudra hindia. Batu hiu berjarak sekitar 14 km dari pangandaran sebagai objek wisata pilihan ketika anda datang ke Pangandaran. Terletak di Desa Ciliang Kecamatan Parigi, kurang lebih 14 km dari Pangandaran ke arah Selatan. Memiliki panorama alam yang sangat indah. Dari atas bukit kecil yang ditumbuhi pohon-pohon Pandan Wong, kita menyaksikan birunya Samudra Indonesia

dengan deburan ombaknya yang menggulung putih. Pantai Batu Hiu ini terletak di Desa Ciliang, Kecamatan Parigi. Pantai ini dinamakan Batu Hiu karena ada batu yang terlihat di laut ini dan menyerupai sirip ikan hiu. Untuk menikmati indahnya pantai, kita bisa naik ke atas bukit kecil di pantai ini. Dari atas bukit itulah kita bisa melihat batu yang menyerupai sirip ikan hiu, merasakan sejuknya angin laut dan juga menikmati indahnya Samudra Indonesia.

Di bukit kecil yang ditanami pandan wong itulah tempat yang paling pas untuk menikmati pantai Batu Hiu. Yang unik, untuk naik ke atas bukit, kita melewati "gerbang" bikit berupa terowongan kecil yang berbentuk ikan hiu. Jadi, seolah-olah kita masuk ke dalam mulut ikan hiu. Kita juga bisa bermain air laut di sebelah bukit. Namun hati-hati dengan ubur-ubur yang banyak berserakan di pasir pantai ya. Sekitar 200 meter dari pinggir pantai terdapat seonggok batu karang yang menyerupai ikan hiu, karena itulah tempat ini dinamakan Batu Hiu. Hembusan angin pantai menemani kita saat melepaskan pandangan ke arah samudra atau hamparan pantai sebelah timur yang terbentang hingga Pangandaran. Anda dapat menikmati suasana alam pantai dengan berjalan-jalan di bukit yang teduh atau duduk santai bersama keluarga. Sungguhpun Anda tidak dapat berenang karena ombaknya yang cukup besar, Anda masih bisa berjalan-jalan di pantai menikmati simbahan busa putih yang datang bersama debur ombak Batuhiu. Jangan lupa untuk membawa cinderamata sebagai oleh-oleh bagi keluarga di rumah yang bisa Anda dapatkan di Batuhiu.

e) Cagar Alam Pananjung

Objek wisata ini merupakan satu-satunya objek wisata hutan yang ada di Pangandaran, Kabupaten Ciamis. Keadaan topografi sebagian besar landai dan di beberapa tempat terdapat tonjolan bukit kapur yang terjal. TWA Pangandaran memiliki kekayaan sumber daya hayati berupa flora dan fauna serta keindahan alam. Hutan sekunder yang berumur 50-60 tahun dengan jenis dominan antara lain laban, kisel, merong, dan sebagainya. Juga terdapat beberapa jenis pohon peninggalan hutan primer seperti pohpohan kondang, dan benda. Hutan pantai hanya terdapat di bagian timur dan barat kawasan, ditumbuhi pohon formasi

Barringtonia, seperti butun, ketapang. Dengan berbagai ragam flora, kawasan TWA Pangandaran merupakan habitat yang cocok bagi kehidupan satwa-satwa liar, antara lain tando, monyet ekor panjang, lutung, kalong, banteng, rusa, dan landak. Sedangkan jenis burung antara lain burung cangehgar, tlungtumpuk, cipeuw, dan jogjog. Jenis reptilia adalah biawak, tokek, dan beberapa jenis ular, antara lain ular pucuk.

Banyaknya flora dan fauna yang berkembang biak di sana merupakan daya tarik tersendiri. Tidak heran jika TWA Pangandaran tidak pernah sepi dari kunjungan para wisatawan. Selain itu, TWA ini mempunyai berbagai daya tarik lainnya, seperti Batu Kalde, salah satu peninggalan sejarah zaman Hindu. Selain itu, banyak terdapat gua alam dan gua buatan seperti Gua Panggung, Gua Parat, Gua Lanang, Gua Sumur Mudal, dan gua-gua peninggalan Jepang. Daya tarik lainnya yang berada di TWA, baik yang berada di kawasan cagar alam darat maupun cagar alam laut, adalah Batu Layar, Cirengganis, Pantai Pasirputih di kawasan cagar alam laut. Lalu, padang pengembalaan Cikamal, yang merupakan areal padang rumput dan semak seluas 20 ha sebagai habitat banteng dan rusa. Air terjun yang berada di kawasan cagar alam bagian selatan, dapat ditempuh dengan jalan kaki selama 2 jam melalui jalan setapak.

f) Pantai Karang Tirta

Objek wisata ini terletak di Desa Sukaresik Kecamatan Sidamulih ke arah Batu Hiu belok kiri. Di objek wisata ini pengunjung selain dapat menikmati keindahan alam juga melakukan rekreasi berupa bersampan, memancing dan berkemah. Fasilitas yang tersedia berupa kedai makanan dan minuman dan pondok wisata. Pantai Karang Tirta juga memiliki sedikit hutan yang disebut Leuweung Nusa, di dalamnya terdapat berbagai jenis tanaman yang sudah lama tumbuh dan ada di sana sejak dahulu.

Pantai Karang Tirta cocok untuk dikembangkan menjadi tempat kegiatan out bond, hal tersebut didukung oleh wisata alam yang ada disekitarnya, seperti : kolam, sungai, muara, delta, sawah, hutan, dan lainnya. Di Pantai Karang Tirta Anda dapat melakukan kegiatan seperti bermain perahu, berenang, kemping, memancing, menjala ikan, mencari taritip (semacam seafood), juga

dapat mencoba membuat gula dari kelapa (wisata agro), belajar membuat opak made in Cipari, belajar nari ronggeng, melihat pembuatan wayang golek (wisata Budaya), serta ada makanan khas di daerah ini yaitu Pindang Gunung - sejenis sup lauk (Wisata Kuliner).

g) Saung Muara

Saung Muara, berada di ujung dari jalan Pamugaran dan bisa di tempuh juga melalui pintu masuk objek wisata Pangandaran via Pamugaran, masuk ke arah kanan menyusuri jalan sekitar 1 km, wisatawan akan mendapati tempat berwisata dengan panorama alam yang masih asri, di kelilingi tumbuhan mangrove dan pandan yang masih tersebar di sekeliling objek. Sejauh mata memandang akan dimanjakan dengan akses pantai dengan pasir yang menggoda untuk di jadikan area berkemah, serta menyaksikan langsung aktifitas nelayan sekitar yang mendirikan berupa saung beserta perangkap ikan berupa Jodang (sebutan warga Pangandaran untuk perangkap ikan) yang sedang melakukan penangkapan ikan. Di sekitar objek tersedia beberapa saung atau berupa Gazebo sebagai sarana untuk bersantai dan juga sudah tersedia mushola dan fasilitas air bersih, dan berdiri satu warung yang menyediakan jajanan dan minuman ringan guna melengkapi kebutuhan wisatawan. Di tempat ini pengunjung bisa menikmati matahari terbenam secara penuh, dan bisa melakukan aktifitas memancing, serta barbeque sembari berkemah atau sekedar makan bersama keluarga dapat di jadikan pilihan menarik untuk melengkapi acara liburan di Pangandaran.

h) Pangandaran *Water Park*

Tempat wisata ini terhitung yang paling muda hadir di wilayah Pangandaran. Berbeda dengan *waterpark* yang ada, *waterpark* Pangandaran berada di pinggir pantai lembah puteri. lokasinya sekitar 5 kilometer sebelum masuk pintu wisata pangandaran, tepatnya di kecamatan Kalipucang. *Waterpark* ini dibangun dalam beberapa kolam besar dan lapangan khusus buat ATV *track* dan dibangun di atas lahan lebih dari 10 hektar.

Fasilitas yang disajikan antara lain seperti umumnya *waterpark*, seperti luncuran,

waterbom dan sebagainya, anda juga bisa menikmati petualangan seperti *highrope* dan yang lainnya, untuk anda yang suka dengan ATV, anda juga bisa memanfaatkan fasilitas yang ada disini. Untuk fasilitas umum biaya yang harus dikeluarkan sekitar 10rb-25 untuk hari-hari besar atau libur panjang. Didalamnya selanjutnya anda bisa menyewa pelampung atau perahu plastik untuk berenang.

i) Pantai Batu karas

Objek wisata yang satu ini merupakan perpaduan nuansa alam antara objek wisata Pangandaran dan Batu Hiu dengan suasana alam yang tenang, gelombang laut yang bersahabat dengan pantainya yang landai membuat pengunjung kerasan tinggal di kawasan ini. Terletak di Desa Batukaras, Kecamatan Cijulang dengan jarak \pm 34 km dari Pangandaran. Pantainya yang landai dengan air laut tenang nan biru menanti Anda untuk segera berenang menikmati airnya yang segar. Anda bisa nikmati suasana tenang dengan angin sepoi-sepoi menikmati hidangan di rumah makan yang tersedia. Pandangan lepas ke ujung cakrawala memberi Anda ketenangan dan kenangan berlibur yang menyenangkan.

Kegiatan wisata yang dapat dilakukan selain berenang antara lain: berperahu di bengawan, berkemah dan berselancar. Jika liburan Anda bersama keluarga, akomodasi telah tersedia untuk Anda, ada pondok wisata yang dilengkapi dengan arena bermain dan rumah ibadah. Pondok wisata ini dikelola langsung oleh Diparda Kabupaten Ciamis. Fasilitas lainnya yang tersedia antara lain: Hotel, Camping Ground, Kios Cinderamata, sewaan papan selancar dan ban renang.

j) Pantai Madasari

Pantai ini menyajikan panorama alam yang spesifik dengan pulau-pulau kecilnya berpadu dengan hijaunya datan masawah, dan dihiasi pula oleh batu-batu karang yang unik, dengan pantainya yang landai.

Disekeliling objek ditumbuhi pepohonan hijau dengan hamparan dataran, serta didalamnya terdapat jalan setapak yang dapat ditempuh dengan berjalan kaki menuju objek wisata pantai Batukaras. Terletak di desa Masawah Kecamatan Cimerak +20 km Dari *Green Canyon* ke arah selatan, dapat

dijangkau dengan berbagai jenis kendaraan atau sekitar 40 km dari Pantai Pangandaran

k) Pantai KeusikLuhur

Merupakan perpaduan antara alam pegunungan dengan panorama pantai. Dari sebuah bukit kita bisa menyaksikan bergelornya samudra Indonesia dengan gelombang laut selatan menghempas karang, sehingga buih-buih putih birunya laut lepas. Gelombang laut mengangkat pasir ke atas batu karang yang terjal sehingga orang menamakannya Keusikluhur (keusik = pasir, luhur = tinggi). Objek wisata ini terletak di Desa Kertamukti Kecamatan Cimerak dengan jarak \pm 45 km dari Pangandaran ke arah selatan.

l) Pantai Karapyak

Sejumlah objek wisata pantai di Kabupaten Ciamis selain Pantai Pangandaran dan Pantai Batu Hiu. Keindahan alam dan pantai yang satu ini melebihi keindahan pantai di Pangandaran maupun Batu Hiu. Pantai yang dimaksud adalah Pantai Karapyak, terletak di Desa Bagolo, Kec. Kalipucang, Kab. Ciamis. Sekitar 20 km dari Pantai Pangandaran atau 78 km dari Alun-alun Kota Ciamis. Untuk menuju lokasi ini tidak begitu sulit, karena akses masuk ke sana sudah bagus, bahkan ada penunjuk jalan yang bisa mengarahkan wisatawan ke Pantai Karapyak. Yang patut disayangkan, belum adanya angkutan umum yang bisa membawa pengunjung ke Pantai Karapyak, sekalipun ojek. Hanya pengunjung yang mempunyai kendaraan pribadi atau kendaraan sewaan yang bisa mencapai Pantai Karapyak. Keindahan Pantai Karapyak memang belum bisa mengalahkan Pantai Pangandaran. Namun bukan berarti tidak layak dikunjungi dan dijadikan objek wisata. Pantai ini mempunyai kelebihan hamparan pasir putih yang memanjang sepanjang kurang lebih 5 km dipadu dengan tonjolan batu karang. Keindahan semakin kentara, ketika ombak laut mulai surut, ikan hias berenang ke sana kemari di sela-sela batu karang. Kepiting kecil dan kumang (kepiting berumah) keluar masuk lubang pasir sambil membawa makanan. Tak hanya itu, cangkang kerang dan hewan moluska lainnya serta karang putih berserakan di sepanjang pantai, menggoda kita untuk mengambil dan mengumpulkannya untuk dijadikan souvenir

laut.

Batu karang yang menghampar dan menjorok hampir ke tengah lautan, memang menjadi surga bagi ikan laut. Ada puluhan ribu bahkan puluhan juta ikan hias yang hidup di sana, jelas membuat Pantai Karapyak lebih hidup dan menantang. Selain hamparan pasir putih dan batu karang, pantai ini pun mempunyai tebing-tebing curam nan indah, yang siap mengundang para petualang untuk menjelajahi tiap jengkal tebing karangnya. Di bawah tebing curam, deburan ombak siap mengolah adrenalin hingga ubun-ubun. Buih-buih ombak di bawah tebing curam seolah menanti cucuran keringat petualangan Anda. Selain menawarkan sejuta keindahan dan petualangan, Pantai Karapyak terbilang masih alami dan perawan. Ini ditandai masih bersihnya pantai dari serbuan sampah plastik maupun sejenisnya. Kondisi alamnya pun masih alami dan terawat. Hanya sayang, pantai ini kurang diminati wisatawan domestik maupun mancanegara. Ini terlihat dari masih jarang warung-warung maupun penginapan yang dikembangkan warga setempat.

Hal ini lebih diakibatkan gelombang ombaknya yang tinggi dan menyeramkan, juga pantainya yang curam karena terhubung langsung dengan batu-batu karang. Juga kurangnya akses masuk ke lokasi tersebut. Padahal di Karapyak sudah didirikan menara pengawas pantai serta sarana lainnya yang siap memanjakan para wisatawan. Terlebih pantai ini lokasinya sangat dekat Pulau Nusakambangan. Cukup dengan menyewa perahu, Anda bisa menginjakkan kaki di pulau yang mengundang sejuta misteri ini. Tak hanya itu, Anda pun bisa berjalan-jalan menyusuri muara Sungai Citanduy atau lebih dikenal dengan sebutan Sagara Anakan. Jauh di tengah laut, berdiri tegak dua batu karang yang membentuk pintu masuk ke Sagara Anakan. Menurut nelayan setempat, Maryono, batu karang tersebut dijadikan benteng pertahanan Dermaga Sagara Anakan dari serbuan ombak yang ganas.

m) Pantai Karang Nini

Objek wisata ini terletak di Desa Emplak, Kecamatan Kalipucang ± 83 km dari kota Ciamis ke arah Selatan. Sepanjang jalan dari pintu gerbang ke lokasi, akan Anda nikmati kesejukan hutan jati dengan irama alam

liarnya. Bukan itu saja, pada beberapa bagian jalan ini akan dihadirkan panorama pantai di kejauhan dengan latar belakang Sagara Anakan. Sungguh sebuah pemandangan yang tak terlupakan apabila Anda datang pada saat cuaca cerah. Sebelum mencapai pantai Anda pun akan menjumpai Pondok Wisata yang dikelola oleh Perhutani Kabupaten Ciamis.

Anda beberapa tipe yang dapat Anda pilih. Dengan tarif/malam yang bersaing Anda dapat bersantai bersama keluarga menikmati suasana alam yang tenang dengan panorama pantai yang menakjubkan. Di pantai ini terhampar batu-batu karang yang salah satunya menyerupai seorang nenek (nini dalam bahasa Sunda) yang sedang menunggu si kakek, sehingga tempat ini dinamakan Pantai Karangnini. Wana Wisata Karangnini adalah obyek wisata alam yang merupakan perpaduan hutan dan pantai. Hamparan hutan Jati dan rimba yang lebat bertaut dengan lautan lepas, ditingkah debur ombak dan berujung di langit biru lazuardi yang membentuk garis horizon di kejauhan, merupakan pesona alam yang menyimpan misteri kebesaran dan keagungan Tuhan.

Dari siluet mentari di ufuk timur, membayang pulau Nusa Kambangan dan teluk Pananjung di selatan, serta kelokan jalan kereta api peninggalan Belanda yang menghilang di ujung terowongan. Kenangan tempo doeloe menerawang dalam lamunan sepur yang sarat muatan, terengah merengkuh tanjakan dan hilang di kelok jalan, menyisakan bunyi raungan keletihan. Semua keindahan itu dapat dinikmati melalui fasilitas:

- Lima pondok wisata berarsitektur tradisional Sunda dengan kapasitas rata-rata tiga kamar
- Saung pertemuan Bale Rancage
- Menara pandang dilengkapi teropong
- Beberapa *shelter* untuk rileks memandang laut lepas
- *Jogging track*
- Hidangan makan malam ikan bakar
- Tempat parkir yang luas dan aman
- Tempat bermain anak-anak
- *Camping ground* kapasitas 300 orang

Joging melalui jalan setapak bisa dilakukan sambil menikmati berbagai jenis flora dan fauna yang hidup di hutan sekitar, seperti Jati (*Tectona Grandis*), Mahoni

(Sweitenia Mahagoni), Angsana (*Pterocarpus Indicus* Willd), Ketapang (*Terminalia Catappa*), Keben (*Barringtonia Asiatica*), Johar (*Casia Siamea*) dan jenis-jenis lainnya. Sedangkan fauna seperti Musang (*Paradoxorus Hermaproditus*), Tupai (*Callosiorus Notatus*), Kera (*Presbytis Cristata*). Wana Wisata Karangnini yang dikelola Perum Perhutani, berada pada jalur wisata Ciamis-Pangandaran. Jarak dari Bandung sekitar 200 km atau 80 km dari kota manis Ciamis, 10 km sebelum Pantai Pangandaran. Karangnini dapat dicapai dengan kendaraan umum atau pribadi, masuk sekitar 2 km, tersembunyi dari kebisingan dan menghadap laut lepas Samudra Indonesia.

Ketinggian dari muka laut sekitar 100 meter. dengan suhu 24 - 30 Derajat Celcius dan kelembaban udara rata-rata 85%. Selain keindahan alam dapat dinikmati pula obyek-obyek kunjungan lainnya:

- ▶ Makam Cikabuyutan dan mata air Sumur Tujuh yang dipercaya dapat membuat orang awet muda dan mampu menyembuhkan berbagai penyakit
- ▶ Beberapa goa keramat, seperti Goa Dompot, Goa Panjang, Goa Parat dan Goa Pendek, yang masing-masing memiliki ciri khas dan kisah yang berbeda. Konon Gua Panjang merupakan jalan tembus menuju Kasunanan Cirebon.
- ▶ Makam Eyang Anggasinga Wencana dan Mahapatih Bagaspati
- ▶ *A q u a r i u m a l a m d i m u a r a* Cipangbokongan, dimana saat air laut surut, kita dapat menikmati berbagai jenis ikat hias yang terjebak di relung-relung terumbu karang.
- ▶ Meneropong pulau Nusa Kambangan di sebelah timur dan cagar alam Pananjung di sebelah selatan, dari menara pandang.

3. Potensi Pertanian

Sektor pertanian di Kabupaten Ciamis sebagai kabupaten induk Pangandaran masih menjadi roda utama penggerak perekonomian, sehingga pengaruhnya terhadap laju pertumbuhan ekonomi sangat dominan. Kondisi inilah yang menjadikan pemerintah kabupaten Ciamis masih fokus terhadap pengembangan potensi sektor pertanian. Sektor pertanian meliputi pertanian tanaman pangan, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan. Dengan juga halnya dengan Daerah Otonom

Baru Pangandaran memiliki potensi bidang pertanian yang dapat mempengaruhi roda perekonomian disamping potensi pariwisata.

a. Pertanian tanaman pangan

Produksi padi sawah merupakan komoditas utama sektor pertanian di Kabupaten Ciamis. Pada tahun 2011 luas panen padi sawah tercatat sebesar 120.212 Ha menghasilkan rata-rata 64,01 kwintal/Ha dengan produksi 769.526 ton. Untuk Daerah Otonom Baru Pangandaran menyumbang luas panen padi sawah sebesar 33.071 Ha menghasilkan rata-rata 63.76 kwintal/Ha dengan produksi 211.227 ton. (sumber: Dinas PertanianTanaman Pangan Kabupaten Ciamis)

b. Perikanan

Luas areal pemeliharaan ikan pada tahun 2011 di kabupaten Ciamis yaitu untuk tambak sebesar 75,50 Ha, kolam 2.636,78 Ha, sawah 115,64 Ha dan kolam air deras sebesar 131 unit. Untuk Daerah Otonom Baru Pangandaran memiliki luas areal pemeliharaan ikan untuk tambak sebesar 75,50 Ha, kolam 293,60, sawah 18,30 dan kolam air deras sebesar 2 unit. Ditinjau dari jumlah produksi ikan menurut tempat pemeliharaan/penangkapan di Kabupaten Ciamis pada tahun 2011 yaitu perikanan laut 759,24 ton, Tambak 715,50 ton, kolam 21.476,04 ton sawah 352,11 ton, kolam air deras 765,80 ton. Untuk Daerah Otonom Baru Pangandaran yaitu perikanan laut 759,24 ton Tambak 715,50 ton, kolam 2.256,12 ton sawah 55,56 ton, kolam air deras 11,69 ton. Sedangkan nilai produksi ikan laut hasil penangkapan nelayan yang masuk Tempat Pelelangan Ikan (TPI) pada tahun 2011 mencapai 759.233 kg dengan nilai 11,876 milyar yang semuanya berada di Daerah Otonom Baru Pangandaran. (sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Ciamis)

c. Peternakan

Populasi ternak besar dan kecil di Kabupaten Ciamis sepanjang tahun 2011 yaitu sapi 37.397 ekor, kerbau 4.992 ekor, kuda 183 ekor, domba 215.180, kambing 154.054 ekor. Untuk Daerah Otonom Baru Pangandaran yaitu sapi 25.341 ekor, kerbau 2.395 ekor, kuda 41 ekor, domba 71.797, kambing 39.915 ekor. (sumber: Dinas Peternakan Kabupaten Ciamis)

d. Kehutanan

Luas hutan Kabupaten Ciamis tersebar di beberapa BKPH/RPH meliputi Ciamis (Madati, Cikoneng, Panjalu, Kawali); Banjar Utara (Gadung, Bunter, Rancah); Banjar Selatan (Pamarican, Cicapar, Banjarsari); Pangandaran (Kalipucang, Pangandaran, Cisoladah) dan Cijulang (Parigi, Cigugur, Langkap). Luas hutan baik yang sudah dikukuhkan maupun yang belum seluas 28.898,73 Ha. PKPH/RPH wilayah Cijulang memiliki luas hutan terluas yaitu sebesar 9.299,88 Ha yang tersebar di kecamatan Cijulang, Parigi, Cigugur, dan Langkaplancar. Hutan terluas berada di gunung Gadung, Cigugur yang mencapai 3.168,9 Ha. Selain hutan yang dikelola PKPH/RPH, terdapat pula hutan rakyat sebesar 31.707,44 Ha yang tersebar di 36 kecamatan. Hutan rakyat terluas berada di kecamatan Kalipucang yaitu sebesar 3.599 Ha.

4. Potensi Keuangan

Adapun potensi keuangan yang ada saat ini diuraikan sebagaimana di bawah ini:

- a. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Ciamis sebesar Rp.58.900.535.511,00 (sumber: Dinas Pengelola-an Keuangan dan Asset Daerah Kabupaten Ciamis)
- b. Pendapatan Asli Daerah (PAD) Daerah Otonom Baru Pangandaran sebesar Rp.20.261.136.389,00 (sumber: bahan laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III)
- c. Bidang Aset: Nilai aset yang akan dilimpahkan kepada daerah otonom baru (DOB) Kabupaten Pangandaran, data sampai dengan 28 Januari 2013 sebesar Rp. 1.022.953.196.324 yang terdiri dari Aset tanah, Aset gedung dan bangunan, Aset jalan, irigasi dan jaringan, Aset peralatan dan mesin, Aset tetap lainnya (sumber: bahan laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III)
- d. Rencana biaya hibah dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat dan Pemerintah kabupaten Ciamis
 - Biaya penyelenggaraan pemerintahan sebesar Rp. 7.500.000.000,00 yang terdiri dari sumber dana hibah APBD Kabupaten Induk dan hibah provinsi yang dilaksanakan selama 2 tahun
 - Penyelenggaraan Pemilu Bupati Pertama sebesar Rp. 7.000.000.000,00 yang terdiri dari sumber dana hibah APBD Kabupaten

Induk dan hibah provinsi (sumber : bahan laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III)

- e. Prediksi Belanja Pegawai (gaji) pada DOB Pangandaran sebesar 211.354.262.258 (sumber: bahan laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III)
- f. Prediksi Belanja langsung pada DOB Pangandaran berdasarkan Koordinasi dengan SKPD sebesar 13.514.506.306,00 (sumber: bahan laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III)

C. Peluang dan Tantangan Kabupaten Pangandaran

1. Peluang Kabupaten Pangandaran

- a) Dalam bidang pariwisata : Objek wisata yang ada di kabupaten Ciamis, dominan berada di Daerah Otonom Baru Pangandaran. Hotel bintang dan non bintang yang terdapat di kabupaten Ciamis sebanyak 227, sementara 217 berada di Daerah Otonom Baru Pangandaran atau sekitar 96%. Jumlah kunjungan wisatawan yang berkunjung ke kabupaten Ciamis tahun 2011 menurut jenis wisatawan sebanyak 9.740 wisatawan mancanegara dan 1.347.602 wisatawan domestik. Dari kunjungan wisatawan tersebut yang berkunjung ke Daerah Otonom Baru Pangandaran adalah 9.740 wisatawan mancanegara (100%) berkunjung ke objek wisata yang berada di Daerah Otonom Baru Pangandaran dan 992.958 wisatawan domestik (74%) dari total wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Ciamis berkunjung di Daerah Otonom Baru Pangandaran.
- b) Potensi Pertanian: Daerah Otonom Baru Pangandaran dalam hal pertanian khususnya padi sawah menyumbang sekitar 27,45 % total produksi padi sawah di kabupaten Ciamis. Bidang perikanan sangat di dominasi oleh Daerah Otonom Baru Pangandaran bahkan untuk hasil ikan penangkapan nelayan 100 % produksi hasil tangkapan ikan laut di kabupaten Ciamis berasal dari Daerah Otonom Baru Pangandaran. Untuk peternakan Daerah Otonom Baru Pangandaran menyumbang 67,76 % produksi sapi; 47,97% kerbau; 24,40 % kuda; 33,36% domba dan 25,90% kambing untuk total produksi peternakan di kabupaten ciamis. Daerah Otonom Baru Pangandaran mempunyai kawasan hutan dengan luas

16.085,47 Ha atau sekitar 55,66% dari total luas hutan kabupaten Ciamis dengan luas 28.898,73 Ha (termasuk didalamnya kawasan hutan Daerah Otonom Baru Pangandaran).

- c) Potensi Pendapata Asli Daerah: Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Ciamis tahun 2011 adalah sebesar Rp.58.900.535.511,00 dan diperkirakan sebesar Rp.20.261.136.389,00 Pendapatan tersebut berasal dari sepuluh kecamatan yang tergabung dalam Daerah Otonom Baru Pangandaran atau sekitar 34,39% PAD kabupaten Ciamis berasal dari Daerah Otonom Baru Pangandaran. Dengan kondisi seperti ini diharapkan bahwa Daerah Otonom Baru Pangandaran mampu mandiri karena potonsi yang dimiliki masih dapat dikembangkan, baik sektor pariwisata maupun pertaniannya.

2. Tantangan Daerah Otonom Baru Pangandaran

a) Sumber Daya Manusia

Sebagai Daerah Otonom baru, Pangandaran masih sangat membutuhkan sumber daya manusia dalam memenuhi semua kebutuhan aparat disetiap Satuan Kerja Perangkat Daerah yang akan dibentuk nantinya. Kebutuhan sumber daya manusianya pada tahap pertama adalah berasal dari kabupaten induk yaitu kabupaten Ciamis. Pengalihan para pegawai ini masih belum dapat dipastikan apakah yang mempunyai kompetensi yang baik atau yang biasa-biasa saja, karena semuanya tergantung dari kebijakan kabupaten induk, selain yang sudah bertugas di sepuluh kecamatan yang masuk dalam Daerah Otonom Baru Pangandaran.

b) Sarana dan prasarana

Pembangunan sarana dan prasarana umum di Daerah Otonom Baru Pangandaran masih jauh dari yang diharapkan masyarakat, seperti sarana kesehatan. Untuk mendapatkan fasilitas rawat inap harus ke Banjar yang menempuh jarak 90 km, pembangunan pelabuhan dan lain-lain masih belum terealisasi dan hal inilah yang salah satu penyebab pangandaran ingin memisahkan diri dari kabupaten Ciamis. Untuk menjadikan Kabupaten Pangandaran sebagai daera wisata yang terkenal maka pemerintahan yang baru dibentuk nantinya mempunyai tanggungjawab yang besar

untuk melengkapi pembangunan sarana dan prasarana umum untuk menunjang terwujudnya pangandaran sebagai daerah tujuan wisata. Dan juga harus melengkapi sarana wisata lainnya.

c) Kesadaran masyarakat

Setelah terwujud sebagai Daerah Otonom Baru, pemerintah kabupaten Pangandaran yang akan di bentuk nantinya akan mempunyai tugas dan tanggungjawab yang besar terhadap pembangunan kesadaran masyarakatnya. Karena terkadang masyarakat berpikir setelah menjadi daerah otonom maka kesejahteraanpun akan meningkat dengan sendirinya. Pada hal sebagai daerah otonom baru masih sangat banyak yang harus dilengkapi dan dibiayai sehingga akan mengeluarkan biaya yang sangat besar dengan demikian alokasi dana yang ada kemungkinan akan kecil untuk pembangunan yang langsung menyentuh masyarakat.

3. Strategi dan Kebijakan

Dalam upaya menganalisis isu-isu strategis digunakan metode analisis kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman atau lebih dikenal dengan metode analisis SWOT (*Strengths, Weakness, Opportunities, Threats*). Berdasarkan hasil analisis SWOT, terdapat empat bentuk interaksi yang merupakan alternatif strategi sebagai berikut:

- ▶ S-O : Penggunaan kekuatan untuk memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*).
- ▶ S-T : Penggunaan kekuatan untuk menghindari atau mengatasi ancaman. Strategi yang harus diterapkan dalam kondisi ini adalah dengan cara strategi diversifikasi tindakan.
- ▶ W-O : Mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang atau memanfaatkan peluang dengan meminimalkan kelemahan. Fokus strategi pada situasi ini adalah stabilisasi atau rasionalisasi.
- ▶ W-T : Meminimalkan kelemahan dan menghindari ancaman. Strategi yang perlu dilakukan dalam kondisi ini adalah defensif atau survival.

a) Perumusan Strategi

Teknik menginteraksikan faktor-faktor kunci

keberhasilan agar terjadi sinergi mencapai tujuan dapat digunakan matriks SWOT. Matriks SWOT dapat digunakan sebagai sarana dalam menyusun beberapa strategi utama pada empat kuadran yang saling terkait dan fokus ke arah tujuan yang telah dirumuskan sesuai peta kekuatan masing-masing instansi. Ada 4 (empat) strategi utama yang dapat dirumuskan dalam empat kuadran SWOT yakni:

- Strategi Ekspansi dirumuskan pada Kuadran I.
 Dalam kuadran I ini dapat diinteraksikan, dipadukan kekuatan kunci dan peluang kunci sebagai suatu Strategi SO kearah ekspansi atau pengembangan, pertumbuhan, perluasan dalam bidang tertentu, dalam mencapai tujuan atau peluang-peluang yang menjanjikan.
- Strategi Diversifikasi dirumuskan pada Kuadran II.
 Dalam kuadran II ini dapat diinteraksikan kekuatan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu Strategi ST untuk melakukan mobilisasi kekuatan kunci, dalam menciptakan diversifikasi, inovasi, pembaharuan, modifikasi di bidang tertentu dalam upaya mencegah ancaman kunci.
- Strategi Stabilitas/Rasionalisasi dirumuskan pada Kuadran III.

Dalam kuadran III ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan peluang kunci sebagai suatu Strategi WO untuk menciptakan stabilitas atau rasionalisasi dalam bidang tertentu dalam upaya mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

- Strategi Defensif/Survival dapat dirumuskan pada Kuadran IV.
 Dalam kuadran IV ini dapat diinteraksikan kelemahan kunci dan ancaman kunci sebagai suatu Strategi WT yang dapat menciptakan suatu keadaan yang defensif atau *survival*, efisiensi yang menyeluruh atau pengurangan kegiatan operasional agar dapat bertahan atau keadaan tidak semakin terpuruk akibat desakan yang kuat dari ancaman kunci.

Berdasarkan matriks SWOT dapat disusun suatu formulasi strategi dengan menginteraksikan faktor-faktor internal dan faktor-faktor eksternal yang menjadi Faktor Kunci Keberhasilan seperti dalam diagram formulasi strategi SWOT dalam Tabel 1.

- b) Penetapan Strategi dan Kebijakan
 Strategi merupakan keseluruhan cara atau langkah dengan penghitungan yang pasti untuk mencapai tujuan atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan

Tabel 1. Formula Strategi SWOT

KAFI (Kesimpulan Analisis Faktor Internal) KAFE (Kesimpulan Analisis Faktor Eksternal)	STRENGTH ► DOB Pangandaran memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan ► Pangandaran sudah menjadi daerah tujuan wisata	WEAKNESS ► Kurangnya Sumber Daya Manusia ► Minimnya Dana
OPPORTUNITIES ► DOB Pangandaran memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan ► Pangandaran sudah menjadi daerah tujuan wisata	ASUMSI STRATEGI S-O ► Dengan pemanfaatan teknologi maka potensi sumber daya alam dapat dimaksimalkan ► Meningkatkan sarana dan prasarana untuk mendukung kunjungan wisatawan	ASUMSI STRATEGI W-O ► Meningkatkan kualitas SDM melalui pendidikan formal dan diklat serta memanfaatkan perkembangan teknologi. ► Peningkatkan kunjungan wisatawan sehingga akan meningkatkan jumlah penerimaan dana.
THREATS ► DOB Pangandaran memiliki potensi sumber daya alam yang dapat dikembangkan ► Pangandaran sudah menjadi daerah tujuan wisata	ASUMSI STRATEGI S-T ► Meningkatkan motivasi kerja untuk menyebarluaskan informasi kepariwisataan ► Memanfaatkan sarana dan prasarana semaksimal mungkin untuk menarik minat wisatawan	ASUMSI STRATEGI W-T ► Meningkatkan kualitas SDM sehingga potensi yang dimiliki oleh DOB Pangandaran dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin ► Membangun sarana dan prasarana umum yang menunjang peningkatan pemanfaatan sumber daya yang ada di DOB Pangandaran

lebih bersifat makro dibandingkan dengan “teknik” yang lebih sempit, dan merupakan rangkaian kebijakan. Sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan-kebijakan dan program-program. Kebijakan merupakan suatu arah tindakan yang diambil oleh pemerintah dalam suatu lingkungan tertentu dan digunakan untuk mencapai suatu tujuan, atau merealisasikan suatu sasaran atau maksud tertentu. Oleh karena itu, kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program/kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam perwujudan sasaran, tujuan serta visi dan misi satuan kerja perangkat daerah.

Dari hasil analisis yang dilaksanakan, dengan membandingkan antara faktor eksternal peluang (*opportunities*) dan ancaman (*threats*) dengan faktor internal kekuatan (*strengths*) dan kelemahan (*weaknesses*) maka posisi DOB Pangandaran berada pada kuadran I (ekspansi), karena perbandingan antara faktor-faktor tersebut masih bernilai positif dan Posisi DOB Pangandaran pada kuadran I merupakan kondisi yang menguntungkan, karena DOB Pangandaran memiliki peluang dan kekuatan sehingga dapat memanfaatkan peluang yang ada. Strategi yang diterapkan dalam kondisi ini adalah mendukung kebijakan pertumbuhan yang agresif (*growth oriented strategy*). Walaupun posisi DOB Pangandaran sangat menguntungkan dan mendukung sebagai daerah yang lebih maju dari kabupaten induk (Kabupaten Ciamis) karena masih baru sehingga pengaruh kelemahan maupun ancaman harus diperhatikan.

Dalam penetapan strategi dan kebijakan DOB Pangandaran harus sesuai dengan visi dan misi kabupaten ini, yang akan ditentukan oleh pemerintah Kabupaten Pangandaran nantinya setelah dibentuk. Dengan melihat kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang ada sehingga strategi dan kebijakan yang ditetapkan akan membawa Kabupaten Pangandaran menjadi kabupaten yang lebih mandiri dari kabupaten induk (Kabupaten Ciamis) sekaligus meningkatkan kesejahteraan penduduknya.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Adapun kesimpulan dan saran yang dapat disajikan oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. SIMPULAN

- ▶ Warga Pangandaran memiliki percaya diri cukup tinggi, karena merasa menjadi lumbung pendapatan. Selain itu, nama daerah ini sudah dikenal luas ke berbagai daerah. Pangandaran merasa telah banyak memberikan kontribusi ke Ciamis lewat pendapatan wisata, pajak hotel, restoran dan lainnya. Tetapi, imbal balik yang diterima Pangandaran dinilai kecil. Keinginan memisahkan diri dari kabupaten induk, muncul, karena adanya kekecewaan dalam penanganan pembangunan di Pangandaran. Infrastruktur yang banyak terbengkalai, serta jarak antara daerah ini ke pusat ibukota kabupaten terlalu jauh, yaitu lebih dari 100 km dan pada tanggal 17 Juli 2007, dibentuk sekaligus ditetapkan Presidium Pemekaran Kabupaten Ciamis Selatan dan berkat perjuangan mereka keluarlah Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat.
- ▶ Daerah Otonomi Baru Pangandaran mempunyai nilai yang sangat strategis dalam strategi pembangunan wilayah selatan Jawa yang digagas pemerintah.
- ▶ Dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Pangandaran maka diharapkan Pangandaran dapat menjadi kota wisata mandiri dengan maksimal dapat mem'branding'kan namanya di dunia pariwisata.

2. SARAN

- ▶ Dengan terbentuknya Daerah Otonomi Baru Pangandaran diharapkan dapat mengatasi jauhnya jarak rentang kendali antara pemerintah dan masyarakat, serta memberi kesempatan pada daerah untuk melakukan pemerataan pembangunan.
- ▶ Pemekaran wilayah diharapkan bukan merupakan bisnis kelompok elit di daerah yang sekedar menginginkan jabatan dan posisi serta euforia demokrasi dan partai-partai politik yang memang terus tumbuh, dimanfaatkan kelompok elit ini untuk menyuarakan “aspirasinya” mendorong terjadinya pemekaran melainkan murni aspirasi dari masyarakat untuk

mendapatkan pelayanan yang lebih baik dari pemerintah.

- Dengan adanya penemakaran daerah Kabupaten Pangandaran dapat memberikan nuansa tersendiri untuk pemerintahan ini karena pangandaran merupakan daerah kabupaten yang berada di wilayah pesisir dan dapat menjadi contoh pemerintahan daerah lain khususnya pemerintahan yang berada di wilayah pesisir.
- Perlunya di buat suatu kebijakan atau regulasi yang mendukung pemerintahan kabupaten pangandaran dalam rangka peningkatan PAD maupun peningkatan sarana dan prasarana serta SDM
- Perlunya dilakukan penelitian lebih lanjut mengenai aspek-aspek yang penting yang mendukung peningkatan pemerintahan daerah Kabupaten pangandaran
- Peran serta pemerintah, dunia usaha, masyarakat dan perguruan tinggi perlu dilakukan agar dapat mendukung terlaksanannya pemerintahan dengan baik dan maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Bratakusumah, Deddy Supriady & Riyadi, 2003. *Perencanaan Pembangunan Daerah: Strategi Menggali Potensi Dalam Mewujudkan Otonomi Daerah*. Jakarta : PT.Gramedia Pustaka Utama
- Handyaningrat, Soewarno, 1996. *Pengantar Studi Ilmu Administrasi dan Manajemen*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Kartasasmita, Ginanjar, 1997. *Administrasi Pembangunan Perkembangan Pemikiran dalam Praktiknya di Indonesia*. Jakarta: PT. Pustaka LP3ES
- Koncoro, Mudrajad, 2004. *Otonomi & Pembangunan Daerah: Reformasi, Perencanaan, Strategi & Peluang*. Jakarta: Penerbit Erlangga
- Manulang M, 1992. *Dasar-Dasar Manajemen*. Jakarta: Ghalia Indonesia
- Michael, Todaro, 1977. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Jakarta: Erlangga
- Moleong, Lexy, 2002. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Nazir, Muhammad, 1988. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT. Gunung Agung
- Ratnawati, Tri, 2009. *Pemekaran Daerah : Politik Lokal & Beberapa Issu Terseleksi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Rangkuti, Freddy, 2006. *Analisis SWOT Teknik Membahas Kasus Terkini*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama
- Rewansyah, Asmawi, 2010. *Reformasi Birokrasi Dalam Good Governance*. Jakarta: CV. Yusaintanas Prima
- Safi'i, HM , 2009. *Manajemen Pembangunan Daerah : Teori dan Aplikasi*. Malang : Penerbit Averroes Press
- Siagian, P. Sondang, 1997. *Filsafat Administrasi*. Jakarta: PT. Toko Gunung Agung
- Sugandha, Dann., 1991. *Administrasi, Strategi, Taktik dan Teknik Penciptaan Efisiensi*. Jakarta: Intermedia
- Sugiyono, 2000. *Metode Penelitian Administrasi*. Bandung: Alfabeta
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1995. *Perencanaan Pembangunan*. Jakarta: Gunung Agung

Dokumen lainnya:

- Undang-Undang No.32 Tahun 2004, Tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang No.21 Tahun 2012, Tentang Pembentukan Kabupaten Pangandaran di Provinsi Jawa Barat
- PP No. 78 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pembentukan, Penghapusan, dan Penggabungan Daerah.
- <http://www.mypangandaran.com/wisata/detail/5/pantai-pangandaran.html>, di unduh pada tanggal 17 April pukul 09.30 WIB
- Kabupaten Ciamis dalam Angka 2012 : Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Ciamis, Badan Pusat Statistik Kabupaten Ciamis
- Bahan laporan DOB Kabupate Pangandaran Pokja II Bidang Administrasi Umum
- Bahan laporan DOB Kabupaten Pangandaran Pokja III Bidang Pendapatan